

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	39.16	persen	41	43	45	48	50	52	55
2	Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	18	unit	1	3	3	3	3	-	31
3	Terehabilitasinya kantor kecamatan	20	buah	22	24	27	29	32	35	35
4	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	0	persen	5	10	15	15	15	75	75
5	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang	1	buah	-	1	1	1	1	1	6
6	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	buah	-	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000	6	buah	-	2	2	2	2	2	16
8	Jumlah dokumen rencana tata ruang	2	buah	5	2	2	2	2	2	17
9	Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang	0	buah	-	1	1	1	1	1	5
10	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang	0	buah	-	-	1	-	1	1	3
11	Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan ruang	0	buah	-	-	1	1	1	1	4
12	Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah	1	kegiatan	3	4	4	4	4	4	24
13	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0	buah	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang	0	buah	-	-	-	-	-	-	5

*Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Tahun 2016 - 2021*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
					1	1	1	1	1	
15	Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	1	buah	-	1	1	1	1	1	6
16	Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	0	persen	10	20	20	20	20	10	100
17	Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	3134	unit	500	500	500	500	500	500	3,000
18	Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	0	buah	-	1	-	1	1	1	4
19	Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang	0	kegiatan	-	1	1	1	1	1	5
20	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	6.56	persen	8	9	11	14	16	20	14
21	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	0	unit	500	500	500	500	500	500	500
22	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0	persen	10	20	20	20	20	10	20
23	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	55.4	persen	58	61	64	67	71	74	67
24	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat	39.16	persen	41	43	45	48	50	52	48
25	Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah kabupaten	35.51	persen	37	39	41	43	45	48	43